

PENERTIBAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG

Hariandi Nofanki^{1(a)}, Syamsir^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}hariandinofanki24@gmail.com, ^{b)}syamsirsaili@yahoo.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

15-08-2022

Diterbitkan Online:

31-10-2022

Kata Kunci:

Penertiban, Pengemis,
Gelandangan

Keywords:

Controlling, Beggars,
Homeless

Corresponding Author:

hariandinofanki24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam penertiban gelandangan dan juga pengemis yang ada di Kota Padang. Untuk mengetahui kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis dan gelandangan di Kota Padang. Serta untuk mengetahui upaya atau hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kinerja Satpol PP untuk penertiban pengemis dan gelandangan di Kota Padang. Tipe riset ini adalah riset Kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu : 1) Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam penertiban gelandangan dan juga pengemis ini sudah dilakukan semaksimal mungkin dan sesuai dengan Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012; 2) Dalam melakukan penertiban gepeng Satpol PP Kota Padang memiliki kekuatan yaitu patroli setiap harinya. Peluang yaitu anggota yang mobile melakukan patroli. Kelemahannya yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Serta ancaman yaitu masih adanya gepeng yang berasal dari luar Kota Padang; 3) Adapun upaya atau hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kinerja Satpol PP untuk penertiban pengemis dan gelandangan di Kota Padang seperti : Komunikasi dengan masyarakat Kota Padang, sarana dan prasarana, kerjasama dengan OPD terkait, dan personil Satpol PP Kota Padang yang kurang memadai.

ABSTRACT

This study aims to determine the performance of the Padang City Civil Service Police Unit in controlling homeless people and beggars in Padang City. To find out the strengths, opportunities, weaknesses, and threats faced by the Civil Service Police Unit in controlling beggars and homeless people in Padang City. And to find out what efforts or things need to be improved in the performance of the Satpol PP for controlling beggars and homeless people in the city of Padang. This type of research is qualitative research. The results of this study are: 1) Implementation of the performance of the Padang City Civil Service Police Unit in controlling homeless people and beggars has been carried out as much as possible and in accordance with Padang City Regulation No. 1 of 2012; 2) In controlling the sprawl, the Padang City Satpol PP has the power to patrol every day. Opportunity is that mobile members carry out patrols. The weakness is the lack of facilities and infrastructure. And the threat is that there are still sprawl from outside the city of Padang; 3) The efforts or things that need to be improved in the performance of the Satpol PP for controlling beggars and homeless people in Padang City, such as: Communication with the people of Padang City, facilities and infrastructure, cooperation with related OPD, and inadequate Padang City Satpol PP personnel.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v1i3.43>



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia yaitu sebanyak 271,3 juta jiwa pada tahun 2021, ini menempatkan Indonesia berada pada posisi nomor 4 dengan jumlah penduduk terbanyak pada tingkat dunia sedangkan pada tingkat Asia Tenggara Indonesia menempati posisi 1 dengan jumlah penduduk terbanyak. Banyaknya penduduk desa yang merantau ke Kota dengan niat untuk mencari pekerjaan tetapi skill dan pengetahuan yang di punya kurang memadai sehingga memaksa para penduduk yang tidak memiliki skill dan pengetahuan ini menjadi pengemis dan juga gelandangan.

Dalam hal ini Polisi Pamong Praja merupakan instansi yang paling bertanggung jawab karena mereka merupakan aparat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah untuk menjaga dan melakukan tugas untuk ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi di bidang pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Kota Padang yang dimaksudkan mengarah ke segala kegiatan guna terlaksananya tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Keteraturan dan kenyamanan masyarakat adalah syarat yang harus dicapai dan juga yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan yang baik, maka diperlukan koordinasi yang bersifat internal maupun lintas batas untuk melakukan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah Kota Padang dalam menertibkan gelandangan dan pengemis telah melakukan berbagai cara serta memberikan pelatihan keterampilan terhadap pengemis dan gelandangan, tetapi hal ini tidak dipedulikan oleh pengemis dan gelandangan membuat keberadaannya mulai meresahkan masyarakat, ini dikarenakan sikap pengemis yang membandel dan tetap melakukan aksinya dengan berbagai cara dan juga hal ini yang membuat Satpol PP sulit untuk menertibkan gelandangan dan juga pengemis ini. Pada saat melakukan penertiban gelandangan dan juga pengemis Satpol PP Kota Padang memiliki keterbatasan atau kekurangan sumber daya yang menjadi hambatan serius untuk mencapai kinerja yang memuaskan bagi Satpol PP Kota Padang. Pada kenyataannya berbagai keterbatasan dan kekurangan fungsi-fungsi tersebut bisa terlihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan, dll. Kelemahan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Padang dalam melakukan penertiban pengemis dan juga gelandangan ini adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Padang.

Jumlah gelandangan dan juga pengemis di Kota Padang dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan dan juga penurunan terlihat bahwa jumlah gelandangan yang paling banyak terdapat di Kota Padang pada tahun 2020 yaitu sebanyak 65 orang, hal ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 jumlah gelandangan yang terdata yaitu hanya sebanyak 3 orang. Sedangkan jumlah pengemis di Kota Padang dari tahun 2016 sampai 2020 juga mengalami kenaikan dan juga penurunan dimana jumlah pengemis yang paling banyak terdata pada tahun 2016 yaitu sebanyak 65 orang dimana pada tahun 2020 jumlah pengemis juga meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 jumlah pengemis di kota padang hanya 25 orang, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu berjumlah 35 orang. Dengan melihat data di atas dan juga masih maraknya para pengemis dan juga gelandangan yang berkeliaran di kota pada maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut. Pada Kota Padang terjadinya kenaikan dan juga penurunan angka pengemis dan juga gelandangan dari tahun 2016 sampai 2020 serta terjadinya kenaikan angka pengemis dan juga gelandangan pada satu tahun terakhir di Kota Padang maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul "Penertiban Pengemis dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang"

METODE PENELITIAN

Tipe riset ini merupakan riset kualitatif dengan metode deskriptif, karena riset ini menggambarkan, menuturkan, dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2006:3) pada dasarnya penelitian kualitatif adalah suatu prosedur untuk dapat menghasilkan sejumlah deskripsi tentang apa yang akan ditulis atau diucapkan oleh orang yang menjadi sasaran penelitian, serta deskripsi mengenai perilaku mereka yang dapat diamati. Menurut Bodgan dan Taylor, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2012: 4). Rasionalitas pemakaian pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif ini dapat mengurai

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. dalam menertibkan pengemis dan juga gelandangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam penertiban gelandangan dan juga pengemis yang ada di Kota Padang

Konsep kinerja menurut Pasolong (2013: 196) mengemukakan bahwa konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Definisi kinerja instansi pemerintah menurut keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara No: 239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja instansi pemerintah difokuskan pada pengukuran kinerja terhadap satuan kerja atau entitas di lingkungan pemerintah.

Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). Menurut Nordiawan (2010) kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi input dan output tetapi juga dari sisi outcome, manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan kinerja Satpol PP dalam melakukan penertiban pengemis dan gelandangan yaitu dengan patroli dan razia rutin, patroli dan razia rutin merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Padang dan dalam hal ini patroli Pol PP Kota Padang telah dikerahkan sebagai pendukung untuk membantu Dinas Sosial Kota Padang untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban serta Kesejahteraan Sosial masyarakat Kota Padang dalam implementasi Perda nomor 1 tahun 2012 Kota Padang.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP ini sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Mereka terus melakukan patroli setiap harinya untuk menjaga Kota Padang bersih dari

gelandangan dan juga pengemis yang ada. Setelah dilakukannya penertiban kemudian para gelandangan dan juga pengemis ini dibawa ke kantor Satpol PP dan disana para gelandangan dan juga pengemis ini juga diberikan sedikit pengetahuan dan pembelajaran serta sedikit di bina, kemudian di data sebelum akhirnya diserahkan ke Dinas Sosial Kota Padang. Selanjutnya kinerja Satpol PP dalam menertibkan pengemis dan gelandangan adalah dengan memberikan pengarahan dan melakukan kerjasama dengan instansi lain serta masyarakat yang ada di Kota Padang. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa pada saat melakukan penertiban pengemis dan juga gelandangan ini Satpol PP selalu memberikan pengertian dan pengetahuan bahwa kegiatan yang mereka lakukan di jalan tersebut melanggar peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat.

Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pengemis dan Gelandangan di Kota Padang

1) Kekuatan (*Strength*)

Menurut menurut Freddy (2013) kekuatan adalah sumber keterampilan dan keunggulan dari pemerintah. Kekuatan dari pemerintah seperti kemampuan profesional yang memberikan keunggulan komparatif bagi pemerintah di lapangan. Kekuatan terletak pada sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan lapangan, hubungan pemerintah dan masyarakat dan faktor lainnya. Menurut Siagian (1995), Kekuatan (*strength*) adalah sumber daya keterampilan atau keunggulan keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan masyarakat yang dilayani oleh pemerintah atau organisasi. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi pemerintah di mata masyarakat. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan, hubungan pemerintah dengan masyarakat, dan faktor-faktor lain. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Padang dalam menertibkan pengemis dan juga gelandangan di Kota Padang adalah Bergeraknya semua anggota Satpol PP dalam melakukan patroli di wilayah Kota Padang serta patroli yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Kota Padang ini dilakukan setiap hari sehingga hal tersebut menjadi kekuatan

Satpol PP dalam menertibkan pengemis dan juga gelandangan ini.

2) Kelemahan (*Weakness*)

Menurut menurut Freddy (2013) kelemahan adalah sumber daya, keterampilan, dan kemampuan yang terbatas atau cacat yang secara signifikan mengganggu kinerja efektivitas pemerintah. Struktur, sumber daya keuangan, keterampilan manajerial, dan citra mereka semuanya dapat menjadi sumber kelemahan. Kelemahan dalam pemerintah berarti keterbatasan atau kekurangan sumber daya, keterampilan atau kemampuan yang menjadi hambatan serius untuk mencapai kinerja yang memuaskan bagi pemerintah.

Menurut Siagian (1995) Kelemahan (*weakness*) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif pemerintah atau organisasi. Fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan pemasaran, citra merek dapat merupakan sumber kelemahan. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kelemahan Satpol PP dalam menertibkan pengemis dan gelandangan yang ada di Kota Padang adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Padang serta terbatasnya personil yang dimiliki, dengan demikian maka dapat menghambat dan memperlambat kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melakukan penertiban gelandangan dan juga pengemis.

3) Peluang (*Opportunity*)

Menurut menurut Freddy (2013) peluang adalah situasi penting yang bermanfaat dalam pengaturan pemerintah. Tren utama merupakan salah satu sumber peluang pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya. Identifikasi segmen lapangan yang baik, perubahan kondisi persaingan atau peraturan, perubahan teknologi, dan peningkatan hubungan dengan masyarakat dapat menghadirkan peluang bagi pemerintah agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik dan maksimal.

Menurut Siagian (1995) Peluang (*opportunity*) adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan pemerintah atau organisasi. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang. Identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan, perubahan pada situasi persaingan

atau peraturan, perubahan teknologi, serta membaiknya hubungan dengan masyarakat dapat memberikan peluang bagi pemerintah atau organisasi. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi peluang Satpol PP ini dalam menertibkan pengemis dan gelandangan adalah anggota Satpol PP ini selalu mobile setiap harinya ada yang memakai kendaraan sepeda motor sehingga anggota Satpol PP selalu ada yang memantau kondisi di lapangan dan juga untuk terus mengamati di setiap sudut Kota Padang yang masih adanya pengemis dan juga gelandangan, ini membuat peluang Satpol PP Kota Padang untuk menertibkan pengemis dan juga gelandangan bisa lebih baik.

4) Ancaman (*Threats*)

Menurut Siagian (1995) Ancaman (*threats*) adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan pemerintah atau organisasi. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang yang diinginkan organisasi. Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, perubahan teknologi serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan perusahaan. Menurut Sedarmayanti (2014) Ancaman (*Threats*) merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu instansi. Ancaman merupakan penghalang utama bagi instansi dalam mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan. Masuknya pesaing baru, pemberian pelayanan yang lambat, meningkatnya kekuatan dari sektor swasta, perubahan teknologi, dan direvisinya atau pembaharuan peraturan, dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan instansi. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ancaman Satpol PP dalam menertibkan pengemis dan gelandangan yang ada di Kota Padang adalah masih adanya pengemis dan gelandangan ini yang berasal dari luar Kota Padang sehingga ini akan membuat kinerja Satpol PP tidak ada habisnya dalam menertibkan gelandangan dan juga pengemis ini.

Upaya atau hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kinerja Satpol PP untuk penertiban pengemis dan gelandangan di Kota Padang

Hariandja (2002:195) menyatakan, bahwa cara untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:

1) Perbaiki kinerja

Dengan dilakukannya perbaikan kinerja maka akan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan dalam upaya meningkatkan kinerja melalui umpan balik yang diberikan oleh instansi.

2) Meningkatkan sarana dan prasarana

Dalam melaksanakan kinerja sarana dan prasarana yang ada sangat diperlukan demi untuk mendukung kinerja yang dilakukan agar bisa berjalan dengan baik dan maksimal oleh karena itu ada baiknya instansi meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai. Tujuannya agar mereka lebih produktif dan semangat dalam bekerja. Sehingga masalah-masalah sepele dalam bekerja dapat diminimalisir. Menurut Puji Lastri T. Sihombing, Maria Ulfa Batoebara (2019) menjelaskan bahwa cara meningkatkan kinerja karyawan sebagai berikut ini :

a) Kedekatan secara profesional atau personal

Dalam hal ini bukan berarti kedekatan antara pekerja dan atasan yang berbeda jenis kelamin, melainkan kedekatan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dalam satu perusahaan. Dengan terjalinnya rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang erat dalam satu perusahaan, maka secara otomatis hal tersebut dapat mendorong munculnya semangat untuk bekerja lebih baik dan giat.

b) Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki suatu perusahaan juga berpengaruh terhadap kinerja para karyawan. Contohnya saja, jika ada instansi yang tidak mau mengeluarkan uang untuk menambah fasilitas, seperti kendaraan atau mesin cetak dan maka secara tidak langsung kinerja dan juga waktu yang produktif akan terbuang percuma.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa upaya atau hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kinerja Satpol PP untuk penertiban pengemis dan gelandangan di Kota Padang

a) Komunikasi atau sosialisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang kurang ke masyarakat. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa halangan dan hambatan yang ditemukan oleh Satpol PP Kota Padang dalam menertibkan pengemis dan juga gelandangan ini adalah adanya

masyarakat yang terus memberi uang kepada gelandangan dan juga pengemis ini sehingga para gelandangan dan juga pengemis ini merasa mudah untuk mendapat uang dan juga membuat mereka betah untuk berada di jalan sehingga diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat Kota Padang bisa berhenti memberi gelandangan dan juga pengemis ini.

b) Sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang kurang mendukung. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana yang masih kurang dengan luasnya Kota Padang dimana sarana dan prasarana ini sangat dibutuhkan demi mendukung agar kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang bisa berjalan dengan maksimal.

c) Belum terjalinnya kerjasama yang baik antara Satpol PP dengan organisasi perangkat daerah terkait. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya sinergi dan juga kerjasama antara Satpol PP dengan OPD terkait serta masyarakat yang ada di Kota Padang.

d) Kurangnya personil yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa Satpol PP ini kekurangan personil dalam melakukan pekerjaannya sehingga mereka kewalahan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian Penertiban pengemis dan gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang maka penulis memberikan kesimpulan bahwa: Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang berjalan seperti apa yang diatur pada Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Satpol PP selalu berusaha melakukan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin dengan cara selalu melakukan patroli setiap hari demi menjangkau wilayah Kota Padang yang sangat luas. Sejauh ini Satpol PP telah melakukan penertiban para gepeng tersebut tetapi diperlukan sinergi antar OPD. Baik Satpol PP maupun Dinsos. Terutama dalam hal perencanaan pembinaan gepeng di Kota Padang agar mereka tidak lagi turun ke jalan, serta peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mengurangi gepeng ini. Masih adanya hal hal

yang perlu diperbaiki agar kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota bisa berjalan dengan baik seperti : Komunikasi dengan masyarakat Kota Padang, sarana dan prasarana, kerjasama dengan OPD terkait, dan personil Satpol PP Kota Padang yang kurang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Engkus Kuswarno, 2008, *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis: "Manajemen Komunikasi Pengemis"*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm 88 Dan 91.
- Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Harbani, Pasolong. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (L A K I P) Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2020.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.
- Novela Rizka, Suryanef. Implementasi Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012 (Studi Tentang Pembinaan Pengemis Di Kota Padang). *Journal Of Civic Education (ISSN: 2622-237X) Volume 3 No. 3 2020*
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.
- Sedarmayanti, 2014, *Manajemen Strategi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sondang P. Siagian. 1995. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.